



LKIP

[Laporan Kinerja Instansi Pemerintah] BAPPEDA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020



Jl. By Pass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8852266, e-Mail : bappedagtloprov@gmail.com

IKHTIAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 memuat informasi tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja selama tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, maka dijabarkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dimana masing-masing sasaran strategis mempunyai indikator kinerja yang diukur setiap tahun untuk dievaluasi tingkat ketercapaiannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun **ketiga** atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2017 - 2022. Dari hasil pengukuran capaian kinerja, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo termasuk OPD yang

telah melaksanakan program dan kegiatan strategis tahun 2020 dengan sangat baik, dimana semua target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berhasil terealisasi 100%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan strategi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo didukung anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 6.282.735.600,00.-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.072.779.829,11,-** atau **95,03%**. Selain itu juga, terdapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 124 orang pegawai yang terdiri atas 86 orang pegawai tetap dan 38 orang pegawai tidak tetap.

Adapun uraian yang lebih terinci mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada Bab II dan Bab III LKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya patut dihaturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan laporan kinerja ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan sajian secara utuh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama seluruh staf sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya pengukuran kinerja program/kegiatan ini dapat menumbuhkan lebih baik lagi semangat motivasi dan semangat kerja sama semua staf dalam menjalankan dan menyukseskan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo



BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si
NIP. 19740311 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Perangkat Daerah	2
1.2.1 Landasan Umum.....	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.2.3 Struktur Organisasi	4
1.2.4 Sumber Daya	6
1.3 Sistematika Penulisan	22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis.....	23
2.1.1 Visi dan Misi	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	25
2.2 Indikator Kinerja Utama	26
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020.....	28
2.4 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja	35
3.1.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.	37
3.2 Realisasi Anggaran	35
3.2.1 Belanja Langsung.....	35
3.2.2 Belanja Tidak Langsung	47
3.3 Permasalahan dan Solusi	47
3.3.1 Permasalahan	47
3.3.2 Solusi	47
BAB IV : PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48

4.2 Saran	48
-----------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Kepangkatan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Perijinan Tahun 2020	7
Tabel 1.2 Formasi Pegawai Menurut Eselonisasi sampai dengan akhir Tahun 2020	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Bidang Kewenangan sampai dengan akhir Tahun 2020	9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Kriteria Gender Tahun 2020	9
Tabel 1.5 Anggaran APBD Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020	10
Tabel 1.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	11
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Gorontalo.....	27
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020	28
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020	30
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020	32
Tabel 3.2 Skala Penilaian	33
Tabel 3.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	35
Tabel 3.1.2 Analisis atau atas efisiensi penggunaan sumber daya	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Bertitik tolak dari Undang-Undang tersebut maka Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan telah membentuk Badan, Dinas, dan Biro yang mana didalamnya termasuk pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian mengalami beberapa perubahan nomenklatur hingga pada tahun 2016 menjadi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan sekarang.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu : “Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan”

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Bappedda Provinsi Gorontalo memprioritaskan pada peningkatan mutu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Rencana Strategis lima tahunan tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) per tahun yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo menyusun satu laporan kinerja yang menyajikan secara utuh pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

1.2. Organisasi Perangkat Daerah

1.2.1 Landasan Hukum

Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 dibentuklah organisasi dan tata kerja perangkat daerah antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penjabat Gubernur Gorontalo Nomor : 03 Tahun 2001 Tanggal 19 Pebruari 2001, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Gorontalo.

Pada perkembangannya, setelah DPRD Provinsi Gorontalo diresmikan pada tanggal 5 Juni 2001 lahirlah produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) dan berhasil memperdakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 14 Tahun 2002. Berdasarkan PERDA Nomor: 14 Tahun 2002 ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo.

Kemudian dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan dan perkembangan pembangunan daerah, pada tanggal 30 Desember 2002 struktur organisasi BAPPPEDA dirubah dan disesuaikan dengan PERDA Nomor: 55 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.

Kemudian sesuai amanat PP 18 Tahun 2016 diadakan penyesuaian lagi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berganti nama menjadi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo yaitu :

1. Tugas pokok

BAPPPEDA Provinsi Gorontalo adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016, BAPPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan melalui sektor untuk peningkatan pembangunan daerah;
- c. Mengarahkan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, tata ruang, data/layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

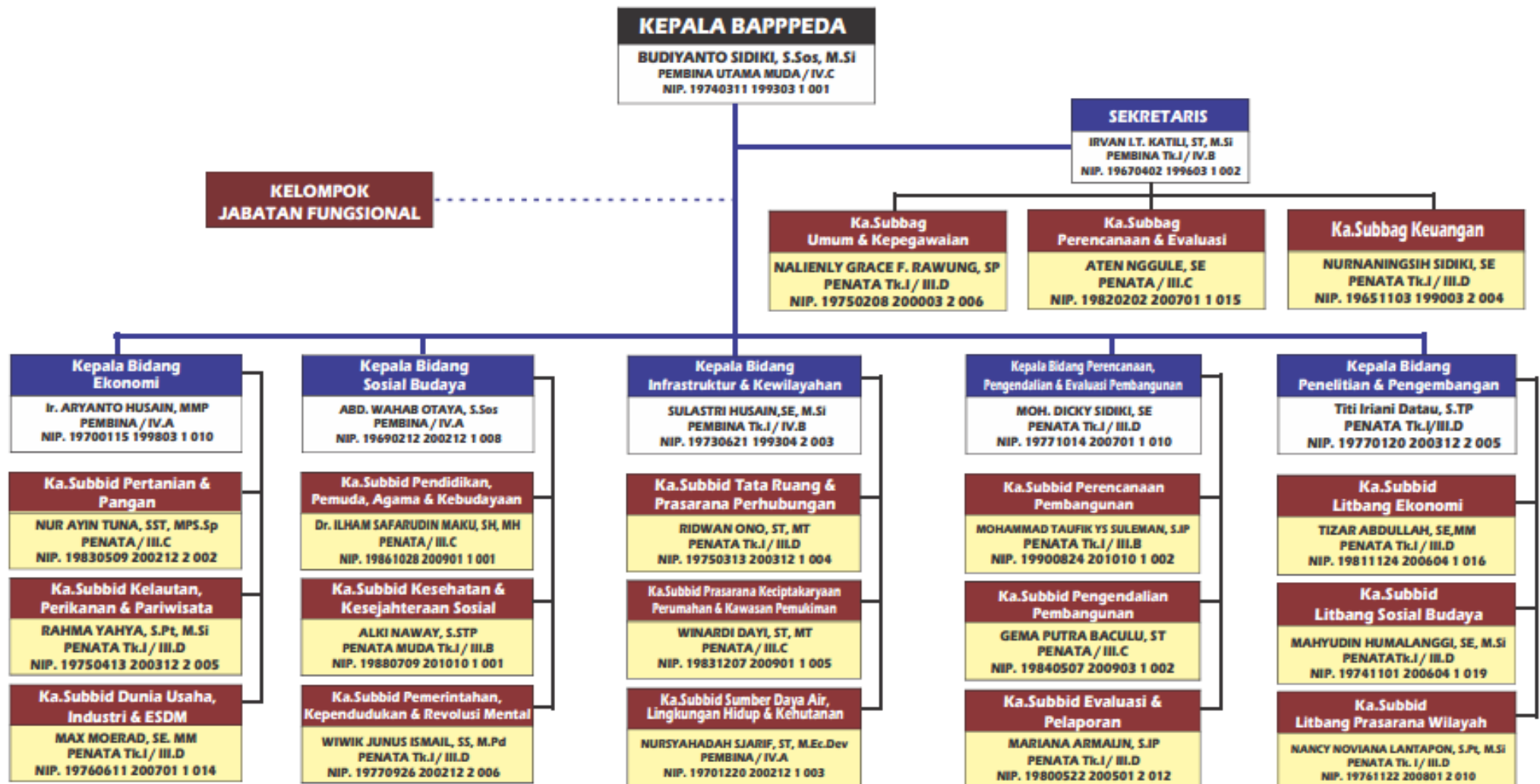
1.2.3 Struktur Organisasi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Bagian Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ekonomi
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Pangan
 - b. Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental
5. Bidang Prasarana Wilayah
 - a. Sub Bidang Tata ruang dan Prasarana Perhubungan;
 - b. Sub Bidang Prasarana Keciaptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Sub Bidang Litbang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO



1.2.4 Sumber Daya

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya yang dapat menggerakkan roda organisasi. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dibutuhkan sumberdaya antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo secara terintegrasi dan komprehensif akan sangat menentukan, maka karena itu peningkatan profesionalisme serta pengembangan budaya kerja diharapkan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini, perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan kriteria gender :

a. Tingkat Pendidikan, Kepangkatan dan Tingkat Perjenjangan

Sampai dengan 31 Desember 2020 Sumber Daya Manusia yang ada di BAPPEDA Provinsi Gorontalo berjumlah 86 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3, serta tingkat kepangkatan tingkat perjenjangan. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Gorontalo dari 86 orang PNS berdasarkan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut: Pendidikan S3 berjumlah 1 orang, S2 berjumlah 20 orang, S1 berjumlah 56, D3 berjumlah 5 orang dan SLTA berjumlah 4 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo
Menurut Kepangkatan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Perjenjangan
Tahun 2020

Kepangkatan		Pendidikan						Perjenjangan				
Gol	Jumlah	Tingkat						Tingkat				
		S3	S2	S1	D3	D1	SMA	Lemhanas	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
IV / d	2		2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
IV / c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV / b	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	6	-
IV / a	8	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	8
III / d	15	1	4	10	-	-	-	-	-	-	-	10
III / c	30	-	3	27	-	-	-	-	-	-	-	-
III / b	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
III / a	5			2	3	-	-	-	-	-	-	-
II / d	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
II / c	5				1	-	4	-	-	-	-	-
II / b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	86	1	20	56	5	0	4	1	0	1	6	18
		86						26				

Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

b. Jumlah Pegawai menurut Eselonisasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka BAPPPEDA Provinsi Gorontalo secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Dari struktur organisasi Bappedda Provinsi memiliki beberapa formasi menurut eselonisasi antara lain :

Tabel 1.2
Formasi Pegawai Menurut Eselonisasi
sampai dengan akhir Tahun 2020

KEPANGKATAN		PENDIDIKAN					PENJENJANGAN					
Eselon	Jumlah (Org)	Tingkat				Jumlah (Org)	Tingkat					Jumlah (Org)
		S1	S2	S3	SLTA		Lemhanas	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
II / a (Kepala)	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1
III / a (Kabid/Kabag/Sek)	6	2	4	-	-	6	-	-	-	4	6	6
IV / a (Kasubbag/Kasubbid)	18	7	10	1	-	18	-	-	-	-	13	18

Sumber : BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

c. Jumlah Pegawai Menurut Bidang Kewenangan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappedda Provinsi Gorontalo Tahun 2019 yang dibagi Sesuai Bidang Kewenangan (PP 39 Tahun 2007) antara lain :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Bidang Kewenangan
sampai dengan akhir Tahun 2020

No	Bidang Kewenangan	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan	Jumlah Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Fungsional
1	Bidang Perencanaan Pembangunan	S3 = 1 Orang	IV / d = 2 Orang	21 Orang	-
		S2 = 17 Orang	IV / c = 0 Orang		
		S1 = 49 Orang	IV / b = 5 Orang		
		D3 = 3 Orang	IV / a = 7 Orang		
		SLTA = 4 Orang	III / d = 10 Orang		
			III / c = 28 Orang		
			III / b = 13 Orang		
			III / a = 4 Orang		
			II / d = 0 Orang		
			II / c = 5 Orang		
			II / b = 0 Orang		
			II / a = 0 Orang		
2	Bidang Penelitian dan Pengembangan	S2 = 3 Orang	IV / d = 0 Orang	4 orang	-
		S1 = 7 Orang	IV / c = 0 Orang		
		D3 = 2 orang	IV / b = 0 Orang		
			IV / a = 1 Orang		
			III / d = 5 Orang		
			III / c = 2 Orang		
			III / b = 2 Orang		
			III / a = 1 Orang		
			II / d = 1 Orang		
			II / c = 0 Orang		
			II / b = 0 Orang		
			II / a = 0 Orang		

Sumber : BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

d. Jumlah Pegawai Menurut Kriteria Gender

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan dan Laki-Laki
Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020 antara lain :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Kriteria Gender
Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	2	6
4	Kasubag	1	2	3
5	Kasubid	5	9	14
6	Pelaksana	32	29	61
Jumlah		44	42	86

Sumber : BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

2. Sumber Daya Keuangan

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya keuangan. Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program dengan menganut proporsi belanja yang mengutamakan kepentingan publik.

Tahun Anggaran 2020 BAPPPEDA Provinsi Gorontalo mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. **14.740.675.453-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp **8.457.939.853-** dan Belanja Langsung sebesar Rp **6.072.779.829-** Secara lengkap anggaran yang dikelola BAPPPEDA dalam Satu tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini :

Anggaran pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo yang selama tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.5
Anggaran APBD Bappeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Tahun 2019	Pagu Tahun 2020	Ket.
Belanja Tidak Langsung (BTL) :		<u>8.851.543.948</u>	<u>8.457.939.853</u>	
1.	Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan PNS)	8.851.543.948	8.457.939.853	
Belanja Langsung (BL)		<u>11.878.010.147</u>	<u>6.282.735.600</u>	
1.	Belanja Pegawai (Honorarium PTT)	1.132.800.000	1.216.800.000	
2.	Belanja Barang dan Jasa	9.799.275.747	4.422.935.600	
3.	Belanja Modal	945.934.400	643.000.000	
TOTAL		20.729.554.095	14.740.675.453	

Sumber : BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

Jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebesar **Rp. 8.457.939.853-** (*Delapan miliar Empat ratus Lima puluh tujuh juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan ribu delapan Ratus lima Puluh tiga rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.431.910.813-** (*Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*) **99,69%**, sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 6.282.735.600-**(*Enam milyar Dua ratus Delapan puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.072.779.829** (*Enam Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) **96,66%**. Alokasi dan realisasi anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Bappeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		
		Fisik	Keuangan	%
Belanja Tidak Langsung (BTL)				
1.	8.457.939.853	100	8.431.910.813	99,69
Belanja Langsung (BL)				
1.	6.282.735.600	100	6.072.779.829	96,66

Sumber : BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

3. Sumber Daya Pendukung Lainnya.

Sumber daya pendukung lainnya selain SDM dan Anggaran, hal yang cukup menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo adalah tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan kantor yang representatif.

Berdasarkan data dari Bendahara Barang BAPPPEDA Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2020, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Prasarana

- ❑ Luas Tanah : 3.000 M²
- ❑ Luas Bangunan : 2.200 M² dengan Konstruksi bangunan 3 (tiga) lantai

b. Sarana :

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket.
-----	--------------	-----------	-----------------	------

1.	Air Conditioning Unit 1 PK	LG	2014	
2.	Air Conditioning Unit 1,5 PK	LG	2014	
3.	Lemari penyimpanan	-	2014	
4.	Lemari penyimpanan	-	2014	
5.	Filling Besi/Metal	Lion	2014	
6.	Mesin Absensi	-	2014	
7.	Alat kantor lainnya (Lain-lain)	-	2014	
8.	AC Unit	Panasonic 1 PK	2014	Hibah
9.	Microphone	Shure SM58	2014	UNDP
10.	Microphone Floor Stand	-	2014	
11.	Microphone Table Stand	KREZT MC-2V	2014	
12.	Unit Power Supply	CE 1200	2014	
13.	Camera Digital	Nikon D.3000	2014	Hibah
14.	P.C Unit	-	2014	UNDP
15.	P.C Unit	Hp	2014	Hibah
				UNDP
16.	Laptop	Assus	2014	Hibah
17.	Note Book	Toshiba Satelit	2014	UNDP
18.	Note Book	Assus	2014	Hibah
19.	Note Book	Toshiba / L 735	2014	Dirjen
20.	CPU	Veriton M 490	2014	PUM
21.	Keyboard	-	2014	
22.	Peralatan Komputer	-	2014	
	Mainframe lain-lain			
23.	Printer	Epson L210FC	2014	Hibah
24.	Printer	Laserjet P1102	2014	UNDP
25.	Printer	Epson L210	2014	Hibah
26.	Printer	Epson	2014	UNDP
27.	Printer	Pixma IP 2770	2014	Hibah
28.	Printer	Canon MX 308	2014	UNDP
29.	Printer	HP	2014	
30.	Monitor	V1173	2014	
31.	Proyektor + Attachment	-	2014	
32.	Proyektor + Attachment	Epson EB-1955	2014	
33.	Proyektor + Attachment	Panasonic PT-		
34.	Microphone/Wireless Mic	VX400NTEA	2014	Hibah
		JTS		UNDP
		US936K/MH936		Hibah
35.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	K	2014	UNDP
		-		Hibah
36.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Prolink	2014	Dirjen
				PUM
37.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Eaton	2014	Hibah
		SPX2200iRT		UNDP
		Prolink PRO		
38.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1200SFC	2014	
			2014	
39.	Screen	Screen Pro		
		S1084	2014	
40.	Personal Komputer	Lenovo	2014	
41.	Personal Komputer	Lenovo	2014	

42.	Personal Komputer	Lenovo Putih	2014	
43.	Recorder	DCR-P-J6E		
Jumlah Pengadaan Tahun 2014				

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
1	Meja Kerja Staf	Topan MTM/ 1/2 Biro	2015	
	Meja Kerja Biro	Topan MTM/ 1 Biro	2015	
2	Kursi Kerja Pejabat Struktural	OCS 08 Oscar hitam	2015	
3	Meja Kursi Tamu	Kayu Ukir	2015	
4	LCD Proyektor	Sony ANSI Lumens 3300	2015	
5	Meja Rapat Aula Lt. 3		2015	
6	Kursi Rapat Aula Lt. 3	Frontline jok Biru	2015	
7	AC Gantung	Panasonic 1 Pk	2015	
8	AC Gantung	LG 1,5 pk	2015	
9	Karpet Aula	398 m2	2015	
10	Meja Kursi Tamu/Sofa	Kayu 2-1-1	2015	
11	Meja Kerja Biro	Kayu HPL	2015	
12	Kursi Kerja Pejabat Struktural	Frontline Oscar Hitam OCS 08	2015	
13	AC Split	LG 2 Pk	2015	
14	Ac Standing	LG 5 Pk	2015	
	Pengadaan Home Use			
15	Mixer Behringer		2015	
16	Power Behringer		2015	
17	Speaker 10"		2015	
18	Equalizier		2015	
19	Rak Mixer		2015	
20	Breaket Speaker 10"		2015	

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
21	Podium Acrilic		2015	
22	Portable Speaker Wireless		2015	
23	Master Controller Amplifier		2015	
24	Microphone		2015	
25	Speaker Microphone		2015	
26	Electrical Instalation (Kabel Audio,Jack Conector,Selang Flexible, dan Jasa Pemasangan		2015	
27	Personal Komputer	Lenovo	2015	
28	Laptop	Lenovo	2015	
29	Printer Dot Matrix	Epson	2015	
30	Printer	Laser Jet	2015	
31	UPS	ICA	2015	
32	LCD Proyektor	3000 Lumens	2015	
33	LCD Proyektor	6000 Lumens	2015	
34	LCD Proyektor	Hitachi CP-X 3030 WN	2015	
35	Layar Proyektor	Sorot belakang	2015	
36	Layar Proyektor		2015	
37	Kamera + atachment	Nikon D7100	2015	
38	Cisco 2900	Seri Integrated Service Router	2015	
39	Cisco ASA550	series busness edition bundle firewall	2015	
40	Cisco Switch	Catalyst 2960 series	2015	
41	Patch UTP		2015	
42	Printer	Dot Matrix	2015	
43	Printer	Laser Jet	2015	
44	Printer	All in One Inject	2015	
45	UPS	1300 va/650 watt	2015	
46	Pengadaan Mesin Foto Copy	Canon	2015	
47	Pengadaan Almari		2015	
48	Pengadaan Laptop	Lenovo	2015	

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
49	Personal Komputer	Lenovo	2015	
50	Printer	Canon ip 2770	2015	
51	UPS	ICA 900 Volt	2015	
52	Mesin Ketik Elektronik	Brother GX-8250	2015	
53	Laptop	Apple MacBook Air	2015	
54	Laptop	Lenovo	2015	
55	Personal Komputer	Lenovo	2015	
56	Komputer/PC All In One	HP	2015	
57	Tabung Pemadam Kebakaran	Servo F1	2015	
58	Hardisk Eksternal		2015	
59	Mobil	Toyota Innova V A/T Luxury (2015)	2015	
60	Motor	Yamaha Soul GT	2015	
61	Komputer/PC All In One	Asus	2015	
62	Laptop	Asus	2015	
Jumlah Pengadaan 2015				
No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
1	Sepeda Motor	Yamaha Yupiter	2016	
2	Sepeda Motor	Yamaha Suzuki /FD 125 XSD	2016	
3	Switch Automatic Genset		2016	
4	Lemari Kayu		2016	
5	Lemari Kayu		2016	
6	Meja Kerja Eselon II		2016	
7	Meja Kerja Staf		2016	
8	Meja Kerja Eselon III		2016	
9	Meja Rapat		2016	
10	Meja Rapat		2016	
11	Kursi Rapat	Frontline / Jok Merah	2016	
12	Kursi Putar	Kursi Kerja	2016	
13	Kursi Putar	Kursi Kerja	2016	
14	Kursi Putar	Kursi Putar Jok Hitam	2016	

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
15	Kursi Putar		2016	
16	Pembungkus Kursi		2016	
17	Pembungkus Meja		2016	
18	AC Unit	LG	2016	
19	AC Unit	Panasonic	2016	
20	AC Split	Panasonic	2016	
21	AC Split	LG	2016	
22	Televisi	Panasonic 43	2016	
23	Wireless	Shure PGX	2016	
24	Mic Conference	Soundbest	2016	
		SB888	2016	
25	Dispenser	Politron	2016	
26	Mixer Power	Mixer Power	2016	
		10ch		
27	Speaker Coloum	Thunder	2016	
28	TOA	ZS-F2000B	2016	
29	TOA	ZH625	2016	
30	Portable Speaker	Crimson 10"	2016	
31	Headset Mic Kabel	Carol MM701	2016	
32	Rak Mixer		2016	
33	Mesin Pemotong Rumput	STINL FR 3001	2016	
34	Alat Pemadam Kebakaran	Gunebo	2016	
34	PC Unit	LG	2016	
35	PC Unit		2016	
36	PC Unit		2016	
37	PC Unit	Lenovo Putih	2016	
38	PC Unit	Asus	2016	
39	PC Unit	Imac	2016	
40	PC Unit	Lenovo	2016	
41	Laptop	Asus	2016	
42	Laptop	Asus	2016	
43	Printer	HP Laser Jet	2016	
		Pro		
44	Printer	Epson L365	2016	
45	Printer	Epson L220	2016	
46	Scanner	Canon P208-II	2016	
47	Harddisk Server	IBM 300 GB	2016	
		1.000 rpm		
48	Stabilizer	Prolink 650 VA	2016	
49	Camera + Attachment	Nikon D7000	2016	
50	CCTV LED Indoor	Dahua	2016	
51	CCTV LED Outdoor	HDCVI 2.4MP	2016	
		1080P		
52	Video Recorder		2016	
53	UPS		2016	
54	Hard Disk		2016	

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
55	Kabel Konektor		2016	
56	Kabel CCTV		2016	
57	Wifi Smart Camera		2016	
58	TV LED	LG 32"	2016	
59	Pesawat Telephone	Panasonic	2016	
60	Facsimile	Panasonic KXFT983	2016	
Jumlah Pengadaan Tahun 2016				

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
1	Station Wagon (SUV,MPV)	Toyota Kijang Inova/V-DSL	2017	
2	Sepeda Motor	Honda Beat ASP CW	2017	
3	Sepeda Motor	Yamaha /X-Ride	2017	
4	Sepeda Motor	Yamaha Vixion Abu-Abu"	2017	
5	Sepeda Motor	Yamaha Vixion Abu-Abu	2017	
6	Sepeda Motor	Yamaha Vixion Hitam	2017	
7	Sepeda Motor	Jupiter MX CW Warna Hijau	2017	
8	Sepeda Motor	Jupiter MX CW Warna Hijau	2017	
9	GPS -0	GPSMAP 76 CSx	2017	
10	Mesin Ketik Listrik Portable	Nakajima	2017	
11	Filling Besi/ Metal	Frontline Hijau	2017	
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	2017	
13	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	2017	
14	Meja Rapat	-	2017	
15	Meja Rapat	Kayu Lapis HPL	2017	
16	Kursi Tamu	-	2017	
17	Kursi Rapat	-	2017	
18	Moubiler Lainnya	-	2017	
19	AC Sentral	Daikin	2017	
20	AC Split	LG 2 PK	2017	
21	AC Split	Sharp	2017	
22	Alat Pendingin Lain- Lain	LG 5 PK	2017	
23	Sound System	-	2017	
24	P.C Unit	LG	2017	
25	P.C Unit	Lenovo /All In One	2017	
26	Lap Top	Asus ZenBook	2017	
27	Lap Top	HP Pavilion	2017	
28	Lap Top	Asus NoteBook	2017	
29	Lap Top	Asus ZenBook	2017	

30	Lap Top	Mac Bookair	2017	
31	Lap Top	Azus	2017	
32	Personal Komputer Lain-Lain	Samsung	2017	
33	Personal Komputer Lain-Lain	Samsung	2017	
34	Personal Kompuet Lain- Lain	Dazumba	2017	
35	Printer	Laserjet Pro M 102a	2017	
36	Printer	Printer Injekt /Deskjet	2017	
37	Printer	-	2017	
38	Printer	-	2017	
39	Printer	Epson /L 120	2017	
40	Printer	Cannon Pixma 1x6560	2017	
41	Scanner	-	2017	
42	Scanner	Cannon /Lide 120	2017	
43	Server	R330	2017	
44	Meja Kursi Pejabat Eselon IV	1 Biro	2017	
45	Meja Kursi Pejabat Non Struktural	-	2017	
46	Camera + Attachment	SONY	2017	
47	TV Monitor	-	2017	
48	Alat Tangki Pengapungan	-	2017	
49	Alat Tangki Pengapungan	-	2017	
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
Jumlah Pengadaan Tahun 2017				

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
1	AC Split	AC split wall merk TCL/TAC 18 CSA /K	2018	
2.	P.C Unit	Benq GL 2430	2018	
3.	P.C Unit	PC All in one Lenovo	2018	
4.	Lap Top	Acer	2018	
5.	Lap Top	Asus Notebook S410UF	2018	
6.	Printer/Lap Top	Printer All in One Epson L310 New 2018	2018	
7.	Meja Kerja Pejabat	-	2018	
8.	Kursi Kerja Pejabat (2 Unit)	-	2018	
9.	Instalasi Listrik	-	2018	
Jumlah Pengadaan Tahun 2018				

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
1	Station wagon(SUV,MPV)	Toyota Rush / 1.5 S M/T TRD	2019	
2.	Pompa Air -	Air Pump 500 Watt	2019	
3.	Kursi Rapat	Chitose	2019	
4.	Kursi Tamu	Kursi Tamu Sofa	2019	
5.	Ac Unit	Polytron / Cassete 5 PK	2019	
6.	Ac Unit	PCT-5003 Panasonic 1 PK-	2019	
7.	Televisi	LG/LED TV 70 Inc	2019	
8.	Sound System	Speaker Line Oroginal TOA Z 5BHX2	2019	
9.	Sound System	Ampifier BMB DA 2000 SE	2019	
10.	Sound System	Power Amplifier BEHRINGER EP 2000	2019	
11	Dispenser	-	2019	
12.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Toren Air Staninles Stel TBSK 1500 L	2019	
13.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Tangki Air Toren 2200 Liter	2019	
14	Pemangkas Rumput	Orange Pemangkas RumpuT STHIL FR 3001	2019	
15	Vertikal Blind/Gorden -0	-	2019	
16	PC Unit	Personel Computer ASUS	2019	

17	Lap Top	Acer Spin 3 (SP314-51-57XK)	2019	
18.	Lap top	Asus GL503GE	2019	
	Lap Top	Asus Zenbook Flip UX461FN	2019	
	Printer	Canon Laser Jet		
19		LBP 6030	2019	
	Printer	Epson LX-310	2019	
20				
	Printer	Epson L3150	2019	
21	Studio Visual	Epson EB-2065		
	Peralatan Jaringan	Projector	2019	
22	Komputer/Internet-0	-		
23	Speaker -0		2019	
		Ceiling Speaker		
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	TOA ZS- 2852	2019	
	Proyektor + Attachment	-	2019	
25		5500		
	Alat Pemanas Prosesing/ Water Heater	Ansi/XGA/Lan	2019	
26.	Mic Wireless Shure-0	-		
27		2 Peggang	2019	
	Telephone Mobile		2019	
28		Samsung/ Galaxy Note		
29	Telephone Mobile	9(512 GB)	2019	
		Samsung/ Galaxy Tab A8		
30	Lampu Senter Pen Light-0	(128 GB)	2019	
31	Lampu Senter/Pen Light-0	Philips LED Floodlight 100 W	2019	
32	Lampu Sorot	HPIT 400 W	2019	
<i>Jumlah Pengadaan Tahun 2019</i>				

Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2019

No.	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Ket
1	P.C Unit	LENOVO / PC	2020	
2.	P.C Unit	ALL IN ONE LENOVO	2020	
3.	Lap Top	Lenovo	2020	
4.	Lap Top	LENOVO,ASUS	2020	

5.	Peralatan Jaringan lainnya		2020	
6.	Sepeda Motor		2020	
7.	A.C. Split		2020	
8.	Wireless		2020	
9.	Mic Conference		2020	
10.	Alat Rumah Tangga Lain-lain		2020	
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain		2020	
12.	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II		2020	
13.	Audio Video (Peralatan Studio Audio)	LOGITECH	2020	
14	Slide Projector		2020	
15	Peralatan Antena MF+HF		2020	
16	Kabel UTP		2020	
17	Peralatan Jaringan lainnya		2020	

c. Kendaraan Dinas, terdiri dari :

◇ Kendaraan Roda 4 (empat), terdiri dari :

- Kendaraan Dinas 5 (lima) unit.

◇ Kendaraan Roda 2 (dua), 11 (Sebelas) unit.

1.3 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan isi LKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi perangkat daerah dan sekilas pengantar lainnya

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi

Perencanaan Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2017-2022, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah lima tahun ke depan. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018–2022 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo 2017-2022 mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu:

GORONTALO MAJU DAN UNGGUL

Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sector pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

GORONTALO SEJAHTERA

1. Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan ekonomi, peningkatan produk domestic regional bruto (PDRB) perkapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
2. Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat opini pengelolaan keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan sejumlah Misi Pembangunan Daerah. Didalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.** Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
- b. **Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan

transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastuktur di perkotaan dan perdesaan.

- c. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bias terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
- d. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.** Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religious serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
- e. **Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah :

“Meningkatnya Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Provinsi Gorontalo untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;

2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran;
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap capaian kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama jangka waktu tertentu. Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan/atau target.

Pada dasarnya, perumusan indikator kinerja utama adalah tanggung jawab manajemen, akan tetapi dapat juga dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang dianggap berkepentingan. Dalam hal indikator kinerja telah dibuat manajemen, maka manajemen dapat meminta kepada auditor untuk mereview apakah indikator kinerja yang disusun telah sesuai dengan syarat-syarat indikator kinerja yang baik.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LKIP setiap tahunnya.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Gorontalo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/Penjelasan
1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	- Persentase OPD yang memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD	Persentase OPD yang memiliki Renstra selaras dengan RPJMD = Jumlah Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD/Jumlah Renstra OPDx100
	- Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD = Jumlah Renja OPD yang selaras dengan RKPD/Jumlah Renja OPDx100
2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan = Jumlah Indikator Kinerja di APBD/ Jumlah Indikator Kinerja di RKPDx100
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan = Jlh Rekomendasi yang termanfaatkan /Jlh Rekomendasi Kelitbangan x100

Sumber : Pergub No. 13 Tahun 2018 ttg Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	- Persentase OPD yang memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD	100%
		- Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	100%
2	Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	100%
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100%

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020

2.4 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penjabarannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan penganggaran. Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Sebagai wujud nyata komitmen untuk mendukung manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Bappeda Provinsi Gorontalo menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang mengacu pada Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo serta RPJMD tahun 2017 - 2022. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Secara ringkas, Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	- Persentase OPD yang memiliki Renstra selaras dengan RPJMD	100%
		- Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	100%
2	Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	100%
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Gubernur, Tahun 2020

Pernyataan dan formulir Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo selengkapnya terdapat dalam lampiran laporan kinerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappedda Provinsi Gorontalo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappedda Provinsi Gorontalo yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa tujuan utama instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2019 dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	- Persentase OPD yang memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD	100 %	100 %
	- Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	100 %	100 %
2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	100 %	91,93 %
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dievaluasi dengan mengelompokkan nilai capaiannya dari masing-masing indikator sasaran, dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Penilaian

Sangat Baik	Lebih dari 100 %
Baik	75 % - 100 %
Cukup	55 %- 75 %
Kurang	Kurang dari 50 %

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo :

Sasaran 1 : Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran

Indikator Kinerja 1 : Persentase OPD yang memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD

Capaian indikator kinerja : Persentase OPD yang memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD, tahun sebelumnya capaiannya sebesar 100 % (Tahun 2018), dan pada tahun 2019 mencapai 100 % dengan kategori **Baik**. Dari pencapaian target indikator kinerja tersebut menggambarkan bahwa seluruh RENSTRA OPD sudah selaras dengan RPJMD, hal ini dapat dilihat dari program yang ada di RENSTRA OPD selaras dengan program yang ada di RPJMD.

Indikator Kinerja 2 : Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD

Capaian indikator kinerja : Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD, tahun sebelumnya capaiannya sebesar 100 % (Tahun 2018) dan pada tahun 2019 mencapai 100 % dengan kategori **Baik**. Dari pencapaian target indikator kinerja tersebut menggambarkan bahwa seluruh Renja OPD sudah

selaras dengan RKPD, hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang ada di Renja OPD selaras dengan kegiatan yang ada di RKPD.

Sasaran 2 : Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran

Indikator Kinerja : Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

Capaian indikator kinerja : Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, tahun sebelumnya capaiannya sebesar 91,02 % (Tahun 2018) dan pada tahun 2019 mencapai 91,93 % dengan kategori **Baik**. Dari pencapaian target indikator kinerja tersebut menggambarkan bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum konsisten antara dokumen APBD dengan indikator kinerja yang ada dalam dokumen RKPD, hal ini disebabkan oleh karena belum terintegrasinya aplikasi perencanaan dan aplikasi penganggaran (keuangan).

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja : Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan

Capaian indikator kinerja : Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan, tahun sebelumnya capaiannya sebesar 100 % (Tahun 2018) dan pada tahun 2019 mencapai 100 % dengan kategori **Baik**. Dari pencapaian target indikator kinerja tersebut menggambarkan bahwa dari 4 hasil rekomendasi kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo semuanya sudah termanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang dihasilkan antara lain :

1. Kajian Fenomena Konsumsi Minuman Keras beralkohol di Gorontalo
2. Potret Sosial Ekonomi Petani Jagung Mitra iGrow Provinsi Gorontalo
3. Analisis Standar Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
4. Pengukuran Indeks Geodiversitas dan Asesmen Kuantitatif dari Geosite di Provinsi Gorontalo (Suatu Rintisan Geopark Gorontalo)

3.1.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2020 pada tabel 3.3

Tabel 3.1.2

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Persentase OPD yang memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD	100	95,60	
		Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	100	97,82	
2.	Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	100	98,16	
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100	99,62	

Capaian kinerja : Realisasi indikator / target x 100% Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator. Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.1.2 di atas, Bappeda Provinsi Gorontalo sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%.

Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran karena adanya refocusing dalam masa pandemi covid 19 sebesar Rp 6.443.040.400,- dari jumlah pagu Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp 10.725.776.000.- tapi kemudian pada triwulan 3 tahun anggaran Bappeda kembali mendapat alokasi melalui APBDP dan Penambahan Anggaran Kebutuhan setelah Refocusing sebesar

Rp. 2.000.000.000,- sehingga di akhir tahun anggaran total pagu menjadi sebesar Rp. 6.282.735.600.-

Belanja yang paling besar mengalami refocusing adalah belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas di hampir semua program dan kegiatan karena belanja tersebut memiliki porsi terbesar dalam formasi anggaran di Bappeda provinsi Gorontalo mengingat kesesuaian tugas dan fungsi yang di milikinya. Namun begitu target dan tujuan yang sudah di tetapkan berupa jumlah pelaksanaan rapat-rapat, seminar-seminar, koordinasi dan konsultasi tidak cukup terpengaruh karena adanya fasilitas lain yang di maksimalkan berupa virtual meeting melalui aplikasi zoom.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada tahun 2019 Bappeda Provinsi Gorontalo menganggarkan belanja langsung APBD dan APBD-P sebesar Rp. 11.878.010.147 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.287.334.737 atau sebesar 95,03 % dan Realisasi Fisik sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
					Anggaran	Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Dokumen	Persentase OPD yang	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.513.577.053	2.402.907.253	95,60	100

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
					Anggaran	Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	memiliki Renstra Selaras dengan RPJMD					
		Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	172.004.186	168.249.086	97,82	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri	159.039.596	155.344.596	97,68	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kelautan, Perikanan dan Pariwisata	160.675.886	157.608.386	98,09	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	544.000.000	249.778.785	94,36	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	248.152.529	238.838.179	96,25	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	203.713.350	192.641.200	94,56	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	220.225.486	214.927.986	97,59	100
			Koordinasi Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	193.749.271	185.923.571	95,96	100
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	240.991.814	231.047.814	95,87	100
			Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	679.592.697	669.916.883	98,58	100
			Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	29.000.000	28.289.300	97,55	100
			Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga	650.592.697	641.627.583	98,62	100
			Program Peningkatan Manajemen Administrasi, Sarana dan Prasarana serta	2.500.146.664	2.421.405.807	96,85	100

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
					Anggaran	Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Sumber Daya Aparatur				
			Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	918.957.425	865.321.185	94,16	100
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.335.526.139	1.310.421.522	98,12	100
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	245.663.100	245.663.100	100	100
			Perencanaan Pembangunan Daerah	363.276.850	334.331.350	92,03	100
			Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	301.200.000	270.081.978	89,67	100
			Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	405.000.000	389.328.372	96,13	100
2.	Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Program Pengembangan Riset Daerah	589.419.186	578.549.886	98,16	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah	214.845.648	210.427.548	97,94	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	170.861.238	165.176.538	96,67	100
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang dan Ekonomi Pembangunan	203.712.300	202.945.800	99,62	100
				6.282.735.600	6.072.779.829	96,66	100

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

Adapun outcome dan output dari masing-masing program dan kegiatan Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD, target 100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Output Kegiatan :

- Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2019 baik secara internal Tim Penyusun LKPJ Gubernur maupun bersama dengan pihak terkait lainnya, meliputi SKPD Provinsi, Instansi vertikal, dll;
- Evaluasi dan koordinasi teknis penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja/RKPD/Renstra/RPJMD se- Provinsi Gorontalo;
- Evaluasi dan pelaporan terhadap hasil Perencanaan Pembangunan Jangka pendek secara triwulan (Triwulan I,II, III, IV);
- Evaluasi dan analisa terhadap progres capaian indikator pembangunan daerah sesuai target perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang; sehingga diharapkan proses pelaksanaan pembangunan secara periodik dapat di jaga koridor pelaksanaannya sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra, atau dalam RKPD maupun Renja;
- Evaluasi terhadap program pembangunan daerah sesuai dengan program pembangunan nasional, ini sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga dapat berjalan secara berkualitas, efektif dan efisien;

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja program unggulan Provinsi Gorontalo, mengingat Tahun 2019 adalah Tahun ketiga periode RPJMD 2017-2022 maka perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana progres pencapaian kinerja program unggulan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo termasuk apa saja yang menjadi kendala dan permasalahannya, sejauhmana capaiannya, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat dari program unggulan tersebut;
- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan DAK provinsi gorontalo, menjaga konsistensi pelaporan Kabupaten/Kota dan Provinsi atas pelaksanaan program dan kegiatan DAK di wilayah provinsi Gorontalo. Monev ini untuk mendorong pelaporan DAK kepada Pemerintah Pusat bisa lebih baik dari tahun 2018 yang terkategori masih rendah oleh Sekber DAK Kemendagri RI. Serta menginventarisir dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana DAK.

2. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Output Kegiatan :

- Pengendalian Dokumen Perencanaan Provinsi dan Penguatan pengendalian dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional;
- Temu Konsultasi Triwulan;
- Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2021;
- Pengendalian, Pengembangan Teknologi Informasi dalam Tahapan Perencanaan Pembangunan.

3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Output Kegiatan :

- a) Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- b) Forum Gabungan OPD;
- c) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Gorontalo;
- d) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Musrenbang Regional Sulawesi, Rakortekrenbang dan Musrenbang Tingkat Nasional;
- e) Proses koordinasi dan konsultasi selama proses penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD tahun 2020;
- f) Fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Kota serta keikutsertaan pada Musrenbang Kab/Kota

4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan.

Output Kegiatan :

- a) Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan bidang Pertanian Pangan yang dibiayai melalui DAU dan DAK tahun 2020;
- b) Terwujudnya komitmen dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian Pangan Tahun 2020;
- c) Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas daerah bidang Pertanian Pangan tahun 2020;
- d) Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja, Memberikan masukan dalam tindak lanjut penyelesaian masalah program/kegiatan yang dihadapi OPD dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta Memberikan input bagi perbaikan Rencana Kerja tahun berikutnya;

- e) Memperkuat koordinasi dan implementasi percepatan perbaikan gizi di daerah melalui program gizi yang bersifat langsung (intervensi spesifik) dan tidak langsung (intervensi sensitif);
 - f) Tersusunnya rencana kegiatan proyek kesehatan dan gizi berbasis pemberdayaan masyarakat di berbagai tingkatan;
 - g) Terevaluasinya pelaksanaan RAD-PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri.

Output Kegiatan :

- a) Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi program perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, ESDM dan penanaman modal dengan peserta antara lain :
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi;
 - Instansi vertikal; dan
 - Stakeholder lainnya yang berkepentingan.
- b) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi program perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, ESDM dan penanaman modal di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh :
 - Kabupaten Bone Bolango 4 Orang sebanyak 2 kali;
 - Kabupaten Gorontalo 4 Orang sebanyak 2 kali;
 - Kabupaten Gorontalo Utara 4 Orang sebanyak 1 kali;
 - Kabupaten Boalemo 4 Orang sebanyak 1 kali;
 - Kabupaten Pohuwato 4 Orang sebanyak 2 kali.
- c) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional di masing-masing Kabupaten yang dilakukan oleh :
 - Kabupaten Gorontalo 4 Orang sebanyak 1 kali;
 - Kabupaten Gorontalo Utara 4 Orang sebanyak 2 kali;

- Kabupaten Boalemo 4 Orang sebanyak 1 kali.

d) Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi program perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang industri, koperasi dan UMKM, serta perdagangan TA. 2020;

6. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Perikanan dan Pariwisata.

Output Kegiatan :

- a. Asistensi Renja SKPD Program dan Kegiatan Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata;
- b. Terwujudnya komitmen dalam mendukung pencapaian program prioritas daerah terkait kemiskinan yang membutuhkan dukungan sektor Kelautan Perikanan di Provinsi Gorontalo;
- c. Tersusunnya program / kegiatan prioritas sektor Kelautan Perikanan yang akan dikawal terus sampai pengesahan APBD;
- d. Terwujudnya solusi, alternative dan dukungan dari SKPD maupun stakeholder terkait mengenai kendala pelaksanaan program / kegiatan di lapangan;
- e. Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata yang dibiayai melalui DAU dan DAK tahun 2021;
- f. Terwujudnya komitmen dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata tahun 2021;
- g. Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas daerah bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata tahun 2021.

7. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Output Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Forum SKPD Penanganan Stunting Terintegrasi;
 - b. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat melalui kegiatan koordinasi, Musrenbangnas dan Rakor teknis terkait tingkat pusat;
 - c. FGD tematik bidang Kesehatan dan Kesos;
 - d. Penguatan peran dan fungsi pokja Kabupaten Kota Sehat (KKS);
 - e. Penguatan peran dan fungsi pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang kesehatan dan kesos;
8. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental.

Output Kegiatan :

- a) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi SDGs Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - b) FGD/Rapat Koordinasi Tematik terkait :
 - Pemberdayaan masyarakat desa;
 - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Pemerintahan dan Tata Kelola;
 - RAD Ranham.
 - c) Rakor Teknis dan Monev DAK;
 - d) Rakor Evaluasi Penyelarasan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan Kependudukan dan Revolusi Mental;
 - e) Rakor Perencanaan Teknis Mitra subidang Pemduk dan Revolusi Mental.
9. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan.

Output Kegiatan :

- a) Koordinasi Perencanaan Pendidikan Agama dan Kebudayaan;
- b) Asistensi Program Kerja Tahun 2020 Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Agama dan Kebudayaan;

- c) Koordinasi Perencanaan secara tematik bidang Pendidikan Agama, Kebudayaan, pemuda & Olahraga.

10. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Output Kegiatan :

- a) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi rutin bidang keciptakarya, perumahan dan kawasan permukiman;
- b) Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi bidang Keciptakarya Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Provinsi;
- c) Terlaksananya Rapat fasilitasi kemitraan;
- d) Terlaksananya Rapat Pokja PKP dan AMPL.

11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air.

Output Kegiatan :

- a) Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi di Tingkat K/L, Provinsi dan Kab/Kota di Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air.

12. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan.

Output Kegiatan :

- a) Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi di Tingkat K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan.

2. Program Pengembangan Riset Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah.

Output Kegiatan :

- a. Penyusunan Jurnal Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo;

- b. Penyusunan Dokumen Kajian tentang Prasarana Wilayah;
- c. Pelaksanaan diskusi tematik prasarana wilayah.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.

Output Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Kelitbangan Sosial dan Budaya;
- b. Koordinasi dan Konsolidasi Kelitbangan Bidang Sosial Budaya.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Output Kegiatan :

- Riset pada Sektor Ekonomi Pembangunan;
- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Riset Daerah;
- Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah, serta Koordinasi dan Konsultasi kegiatan kelitbangan sektor Ekonomi.

3. Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Bappeda)

Outcome dari program ini adalah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output Kegiatan :

- Jumlah Laporan Keuangan OPD, 17 Laporan.

2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga

Output Kegiatan :

- Forum BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Lembaga, 1 Kegiatan;
- Forum Lintas SKPD antar BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota, 3 Kegiatan;
- Laporan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, 1 Dokumen;

- Laporan LAKIP, LPPD, Bulanan dan Renja BAPPEDA, 4 Dokumen.

4. Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (BAPPEDA)

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output Kegiatan :

- Jumlah kebutuhan administrasi dan pelayanan pada Sekretariat BAPPEDA 12 Bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Teknis pada BAPPEDA Provinsi Gorontalo

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi.

Output kegiatan :

- Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek substantif

3.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Anggaran Belanja tidak langsung Bappeda Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp. 8.457.939.853,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.431.910.813,-

3.3. Permasalahan dan Solusi

3.3.1 Permasalahan

Pada Tahun 2020 pelaksanaan semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan

penggunaan anggaran telah dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi esensialitas pencapaian target pelaksanaan fisik program/kegiatan. Rata-rata kegiatan pada tahun 2019 realisasinya mencapai diatas 90%, namun ada dua kegiatan hanya mencapai realisasi dibawah 90,00% yaitu 1) kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (85%), ini diakibatkan ada beberapa belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya diantaranya : Belanja Listrik, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Mobil Hibah UNDP); dan 2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (89,67%), beberapa belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya antara lain : Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur, Belanja Cetak dan Belanja Makanan dan minuman Rapat

3.3.2 Solusi

Solusi kedepannya perlu dilakukan perhitungan kembali kebutuhan anggaran untuk masing-masing belanja dimaksud agar nantinya kejadian serupa tidak terjadi kembali.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja program/kegiatan yang telah dilakukan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut terlihat dari presentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai antara 91,93% sampai dengan 100,00% dari 3 (tiga) indikator sasaran yang direncanakan dengan kategori **Baik**, serta dapat dilihat pula pada presentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 95,03 % dengan penilaian berkategori **Baik** untuk seluruh kegiatan, yaitu 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dimana semua kegiatan terealisasi dengan baik sesuai dengan target perencanaan.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan program/kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Perlu adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung aktivitas dan proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang;

3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
6. Perlu adanya sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat di pertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR LAMPIRAN